**PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA**

**ARTIKEL DISERTASI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum

Pada Universitas Pasundan

Disusun Oleh :

**Nama : RIKI ISMAIL BAROKAH**

**NPM : 199030035**

**Rumpun Ilmu : Hukum Tata Negara**

****

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**FAKULTAS PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2022**

# **ABSTRAK**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa mengingat dalam tataran praktik masih terkendala oleh banyaknya permasalahan dalam pengelolaannya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa oleh Pemerintah Desa yang berlangsung saat ini; 2) Bagaimana konsep pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa oleh Pemerintah Desa yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan disertasi ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data secara penelitian kepustakaan (*library research*), dengan analisis data yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa secara yuridis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Konsep pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa oleh Pemerintah Desa yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat ke depan dapat dilakukan melalui beberapa perubahan kebijakan sebagai berikut: a) dasar pengalolasian Dana Desa harus berdasarkan perspektif kebutuhan masing-masing Desa (*bottom-up*) dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tetap memperhatikan rasa keadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat; b) penetapan Dana Desa harus dilakukan oleh Kepala Desa guna mewujudkan keadilan dan kepastian peruntukan Dana Desa; c) proses penyaluran Dana Desa dari RKUN harus langsung ditransfer ke RKD dalam rangka efisien, ekonomis, efektif dan percepatan pembangunan Desa guna kepentingan kesejahteraan masyarakat; dan d) penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dapat dilakukan secara langsung oleh Kepala Desa kepada Menteri Keuangan.

Kata Kunci: Desa, Pemerintah, Pengelolaan.

# ***ABSTRACT***

*Village Fund is a fund sourced from the State Revenue and Expenditure Budget designated for Villages which is transferred through the district/city Regional Revenue and Expenditure Budget and is used to finance government administration, development implementation, community development, and community empowerment. This research focuses on the management and accountability of the Village Fund considering that at the practical level it is still constrained by the many problems in its management. Based on these problems, the authors identify several problems as follows: 1) How is the current management and accountability of village funds by the Village Government; 2) How is the concept of village fund management and accountability by the Village Government that can realize community welfare.*

*The research specifications in the preparation of this dissertation are carried out in a descriptive analytical way, namely describing the existing problems and then reviewing and analyzing them using primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method used in this study is a normative juridical approach using a statutory approach and a conceptual approach. In addition, this study also uses a comparative law approach. In this study, the data collection technique used is library research, with qualitative data analysis. Qualitative research aims to obtain a complete picture of something according to the view of the human being studied in relation to the ideas, perceptions, opinions, or beliefs of the people being studied, all of which cannot be measured by numbers.*

*The results of the study show that the management and accountability of the Village Fund is legally regulated in Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Village Funds Sourced from the State Revenue and Expenditure Budget as amended several times, most recently by Government Regulation Number 8 of 2016 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 60 of 2014 concerning Village Funds Sourced from the State Revenue and Expenditure Budget. The concept of Village Fund management and accountability by the Village Government that can realize future community welfare can be carried out through several policy changes as follows: a) the basis for the allocation of Village Funds must be based on the perspective of the needs of each village (bottom-up) in community development and empowerment by continue to pay attention to the sense of justice and prioritize the interests of the local community; b) the determination of the Village Fund must be carried out by the Village Head in order to realize justice and certainty of the allocation of the Village Fund; c) the process of distributing Village Funds from the RKUN must be directly transferred to the RKD in the context of being efficient, economical, effective and accelerating Village development for the benefit of community welfare; and d) submission of a report on the realization of the use of the Village Fund can be carried out directly by the Village Head to the Minister of Finance.*

*Keywords: Village, Government, Management.*